

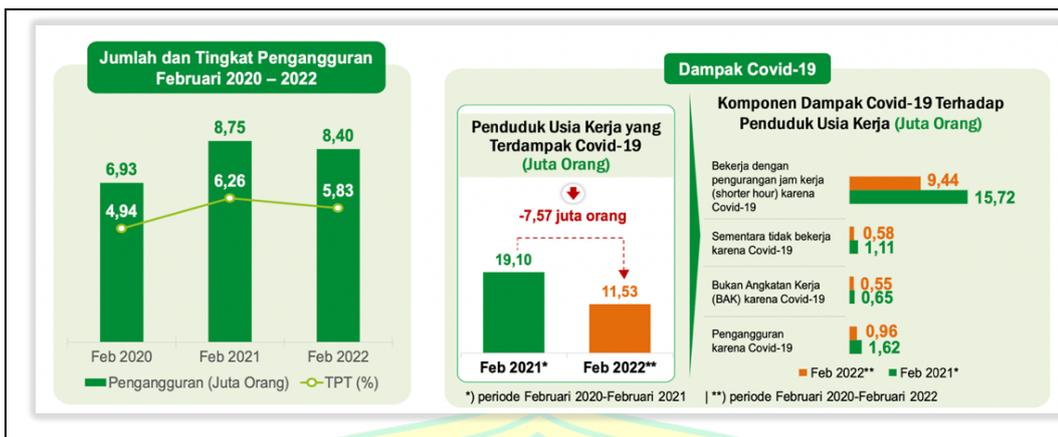
BAB I

PENDAHULUAN

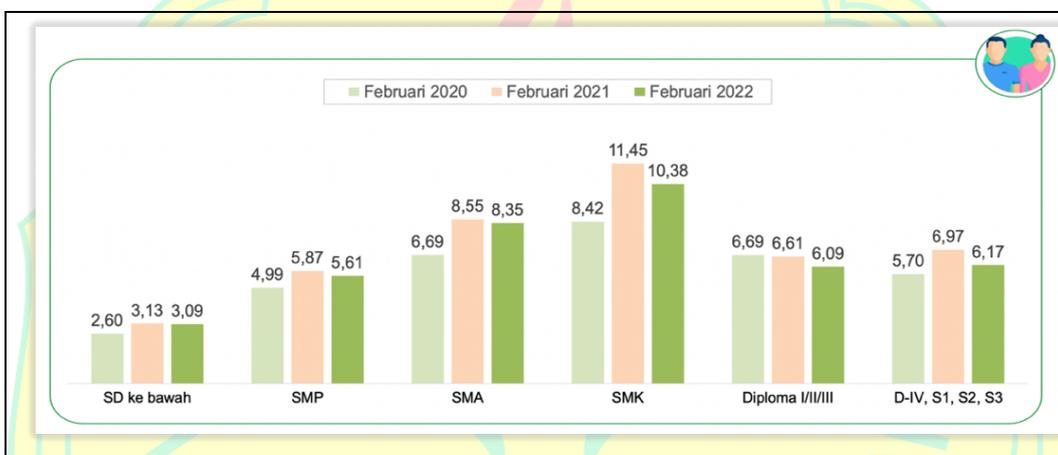
A. Kontek Penelitian

Program pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2020, dimaksudkan untuk merespon dampak pandemik Covid-19 terhadap permasalahan tingkat pengangguran angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Indonesia. Program ini merupakan proyek semi bantuan sosial melalui kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” yang ditujukan bukan hanya bagi golongan tenaga kerja yang mencari pekerjaan, tetapi juga golongan buruh, karyawan yang berusia di atas 18 tahun yang sedang tidak melakukan pendidikan formal hingga pencari kerja dan pelaksana usaha mikro yang terdampak perekonomiannya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

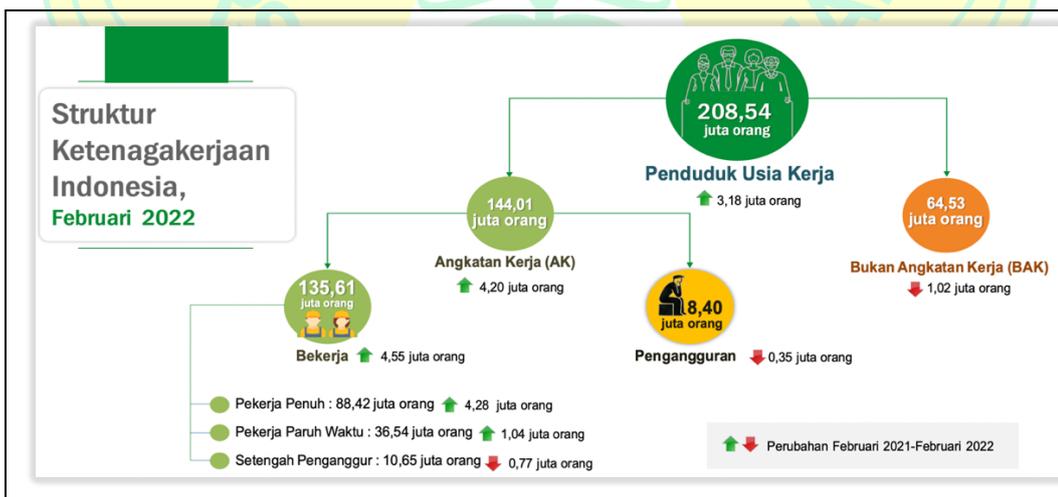
Badan Pusat Statistik (BPS) mendata angka putus kerja akibat Covid-19 melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2022 adalah 960 ribu orang putus kerja, berasal dari 40% golongan pekerja berumur 15-24 tahun. Pengangguran karena Covid-19 sebagai putus kerja yang tidak bekerja disebabkan Covid-19 dari tahun 2020 telah menurun dari jumlah 2,56 juta orang menjadi 1,62 juta orang pada tahun 2021 dan tersisa 960 ribu orang ditahun 2022, sedangkan golongan putus kerja karena Covid-19 yang berasal dari pekerja berumur 15-24 tahun adalah 382,3 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Tingkat pengangguran tertinggi tersebut berasal dari jenjang pendidikan SMK pada tahun 2022 yaitu 208,54 juta orang dengan komposisi 144.01 juta orang angkatan kerja dan 64,53 bukan angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2022)



Gambar 1.1 Jumlah Pengangguran Dan Dampak COVID-19 Atas Penduduk Usia Kerja Tahun 2020, 2021, 2023. Sumber Sadur : Badan Pusat Statistik (2022)



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan Tahun 2020, 2022, 2023. Sumber Sadur : Badan Pusat Statistik (2022)



Gambar 1.3 Struktur Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2022. Sumber Sadur : Badan Pusat Statistik (2022)

Pengembangan kompetensi tenaga kerja pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional” (PEN), dinamai sebagai “Kartu Prakerja” ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dengan tujuan untuk meningkatkan kecakapan dan kompetensi golongan angkatan kerja guna mengoptimalkan kinerja serta kapabilitas angkatan kerja, dan memajukan kewirausahaan melalui program berbasis kecakapan dan kompetensi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2020 mengemukakan bahwa, “Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan paska pandemi.”

Program ini diprioritaskan kepada pendidikan dan pelatihan berdasarkan okupasi, kompetensi dan kecakapan kerja didasari kepentingan pasar atau ekosistem kerja, melalui kriteria standar kompetensi kerja yang telah diakui secara nasional. Jenis pelatihan berbasis kompetensi kerja yang dirancang khusus untuk mengembangkan kompetensi peserta didik pada okupasi tertentu adalah sesuai dengan ketentuan yang distandarkan dan persyaratan di ekosistem kerja. Okupasi yang dimaksud merupakan pekerjaan atau jabatan yang ada di pasar kerja yang merujuk pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) sebagai pedoman untuk menetapkan standar klasifikasi jabatan pada sektor lapangan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan Dan Badan Pusat Statistik, 2014)

Klasifikasi yang dimaksud pada KBJI adalah: (1) tenaga profesional, (2) teknisi dan asisten profesional, (3) tenaga tata usaha, (4) tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan, (5) pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan, (6) pekerja pengolahan dan kerajinan, (7) operator dan perakitan mesin, (8) pekerja kasar (Kementerian Ketenagakerjaan Dan Badan Pusat Statistik, 2014).

KBJI 2002		KBJI 2014	
Golpok		Golpok	
3	Teknisi dan Aisten Tenaga Profesioanl	2	Profesional
		3	Teknisi dan Asisten Profesional
4	Tenaga Tata Usaha	7	Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI
		3	Teknisi dan Asisten Tenaga Profesional
5	Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan di Toko dan Pasar	4	Tenaga Tata Usaha
		3	Teknisi dan Asisten Profesional
6	Tenaga Usaha Pertanian dan Peternakan	4	Tenaga Tata Usaha
		5	Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan
7	Tenaga Pengolahan dan Kerajinan Ybdi	9	Pekerja Kasar
		5	Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan
8	Operator dan Perakit Mesin	6	Pekerja Terampil, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		7	Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI
9	Pekerja Kasar, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga YBDI	9	Pekerja Kasar
		3	Teknisi dan Asisten Profesional
		7	Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI
		8	Operator dan Perakit Mesin
		3	Teknisi dan Asisten Tenaga Profesional
		7	Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI
		8	Operator dan Perakit Mesin
		5	Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan
		9	Pekerja Kasar

Gambar 1.4. Golongan Pokok Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia. Sumber Sadur : Kementerian Ketenagakerjaan Dan Badan Pusat Statistik (2014).

Sejak tahun 2020 hingga saat ini beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan swasta telah menjadi bagian dari ekosistem penyelenggara program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia, dimana lembaga tersebut telah diverifikasi serta divalidasi untuk menyediakan berbagai jenis pelatihan sesuai kebutuhan dan minat peserta didik pada pokok jabatan. Program pendidikan dan pelatihan tersebut dapat diakses di mitra *platform digital* yaitu (1) Tokopedia, (2) Ruangguru, (3) MauBelajarApa, (4)Bukalapak, (5) Pintaria, (6) Sekolahmu, (7) Kementerian Ketenagakerjaan, (8) Pijarmahir yang ditunjuk sebagai mitra resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sehingga peserta didik dapat memilih program yang diminati melalui *platform digital*.



Gambar 1.5. Tampilan Laman Program *Digital Platform*. Sumber Sadur :

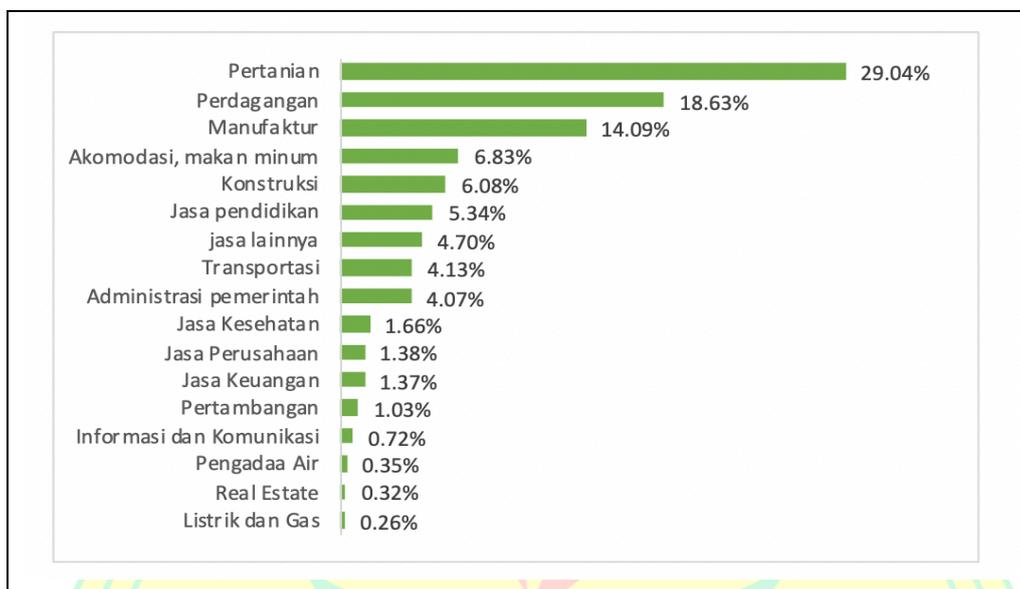
<https://www.prakerja.go.id>

Program pendidikan dan pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan merupakan proses pembelajaran menggunakan teknologi internet dengan perpaduan *asynchronous learning* dan *synchronous learning* untuk peserta didik di Indonesia. Peserta didik dapat berinteraksi langsung dalam waktu yang sebenarnya pada metode *synchronous learning*, dengan jadwal pelajaran yang telah ditentukan di platform media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan meliputi tatap muka jarak jauh terjadwal sehingga peserta didik dan pengajar memiliki interaksi dalam waktu bersamaan. Pada metode *asynchronous learning* peserta didik juga dapat tidak berinteraksi secara langsung pada saat yang bersamaan dan dapat mengakses media audio visual, bahan ajar elektronik, tugas tidak langsung, serta mengikuti forum diskusi tanpa batasan waktu dan lokasi ajar.

Program pendidikan dan pelatihan okupasi tenaga penjual yang akan dikaji pada penelitian ini berlandaskan pada rujukan KBJI tahun 2014 dengan jenis okupasi golongan pokok yaitu nomor 5 dimana okupasi tersebut menjadi dua golongan yaitu: (1) tenaga usaha jasa, (2) tenaga penjualan, dengan sub golongan pokok adalah nomor 52 pada tenaga penjualan, tugas okupasi meliputi menjual barang atau jasa secara grosir atau ritel secara tatap muka atau melalui kontak suara (Kementerian Ketenagakerjaan Dan Badan Pusat Statistik, 2014).

Penentuan jenis okupasi program pada penelitian ini didasarkan dari kajian hasil laporan lapangan pekerjaan utama penduduk dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia, dimana presentase penduduk berdasarkan lapangan usaha pekerjaan kedua terbanyak adalah di sektor

perdagangan, yaitu 18,63% dari populasi tenaga kerja di Indonesia, sehingga peneliti memilih program okupasi tenaga penjual sebagai wilayah penelitian.



Gambar 1.6. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Tahun 2020. Sumber Sadur : Badan Pusat Statistik (2020)

Gambar 1.7. Laman Platform Digital Program Pendidikan Dan Pelatihan. Sumber Sadur : <https://app.karier.mu/mitra/arsikei-consulting>

Sistem manajemen informasi pembelajaran pada program jarak jauh okupasi tenaga penjual berlangsung dari hulu ke hilir yang diakomodasikan oleh mitra *platform digital*, seperti proses awal penerimaan peserta didik hingga kelulusan mendapatkan sertifikat. Pada sistem pendaftaran awal, peserta didik yang telah menerima konfirmasi kepesertaan dari manajemen pelaksanaan program “Kartu Prakerja” dapat melanjutkan ke dalam sistem kegiatan belajar jarak jauh dengan memilih topik yang diminati sesuai dengan klasifikasi baku jabatan. Peserta didik dapat juga meninjau paparan tujuan pelatihan di laman *platform digital*

seperti deskripsi umum pelatihan, silabus, metode ajar, mekanisme penilaian dan evaluasi, dan detail tenaga pendidik dan penyelenggara. Sistem manajemen kearsipan yang disediakan bertujuan untuk mengelola aset pengetahuan secara elektronik dan administrasi pendukung manajemen pengetahuan lainnya diakses oleh tenaga pengajar dan pemangku kepentingan yang terkait.

Tenaga pengajar pada program pendidikan dan pelatihan program pengembangan kompetensi okupasi tenaga penjual dapat mengunggah materi pembelajaran dan mengakses sistim penilaian yang dilakukan guna pengukuran kemampuan awal dan akhir peserta didik. Pada sistem manajemen hubungan komunitas, peserta didik dapat melakukan aktivitas komunikasi melalui saluran siaga penyelenggara mengenai informasi umum berkenaan dengan kegiatan pelatihan, informasi alumni, dapat terakses dengan mudah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia yang telah digunakan pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia “Kartu Pekerja” melalui kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional” PEN telah mencapai 20 triliun rupiah yang teralokasi ditahun 2020, sedangkan pagu anggaran ditetapkan adalah sebesar 5,6 triliun rupiah untuk penyelenggara dan mitra *platform digital*, dengan jangkauan 53,3 juta peserta pada 34 provinsi dan 514 kabupaten, serta total insentif yang dikeluarkan untuk alumni program adalah 13,35 triliun rupiah (Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, 2021).

Dikarenakan kepesertaan gelombang awal hingga gelombang 22 yang telah dibuka pada bulan April tahun 2020 dengan jumlah penerima berkisar 11,4 juta orang telah berakhir ditahun 2021, dan Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa anggaran program yang terserap Kartu Prakerja pada tahun 2022 adalah 99,12%, dan total serapan anggaran adalah Rp 17,84 triliun, penerima manfaat adalah 4.984.790 peserta didik ditahun tersebut, maka proses evaluasi dapat dilaksanakan guna mengetahui keefektivitas program guna mendapatkan informasi terkait hasil dan dampak pelaksanaan. Pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan diharuskan guna melangsungkan peninjauan dan penilaian pengadaan pelatihan untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pelatihan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pada pasal 21.

Evaluasi dimaksudkan sebagai rangkaian sistem secara keseluruhan yang digunakan melihat keefektifitasan sebuah program bertujuan guna pencapaian program jangka pendek dan panjang pada pendidikan dan pelatihan. Proses sistematis dan kontinu ini bermanfaat untuk mendapatkan laporan kualitas dan kuantitas serta memahami relevansi program terhadap kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan evaluasi pendidikan yang cantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu. Evaluasi pada manajemen pendidikan dimaknai sebagai salah satu rangkaian pada proses keseluruhan sebuah pengelolaan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Berangkat dari keunikan serta tidak ada pembatasan masalah dan *grand tour* yang telah dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang bertajuk **“Evaluasi Implementasi Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Penjual Pada Program Semi Bantuan Pemerintah Republik Indonesia”**. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pihak yang terkait yang menyelenggarakan program dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia serta Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan non formal.

B. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan dimensi menarik untuk diteliti sehingga fokus penelitian ini adalah **“Evaluasi Implementasi Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Penjual Pada Program Semi Bantuan Pemerintah Republik Indonesia”**. Dengan sub fokus adalah sebagai berikut:

1. Komponen *Context* yang meliputi: landasan yuridis dan hukum, kebutuhan dan sasaran, visi, misi serta tujuan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga penjual pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia.

2. Komponen *Input* yang meliputi: penyusunan kurikulum serta desain pembelajaran, moneter, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta peserta didik pada pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga penjual diprogram semi bantuan pemerintah Republik Indonesia.
3. Komponen *Process* yang meliputi: pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga penjual pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia.
4. Komponen *Product* yang meliputi: hasil dan dampak pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga penjual pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan fokus dan sub fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah landasan yuridis dan hukum, kebutuhan dan sasaran, visi, misi serta tujuan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga penjual pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah penyusunan kurikulum serta desain pembelajaran, moneter, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta peserta didik pada pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga penjual diprogram semi bantuan pemerintah Republik Indonesia?
3. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga penjual pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia?
4. Bagaimanakah hasil dan dampak pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi tenaga penjual pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah substansi ilmu pengetahuan pada manajemen pendidikan terkait dengan evaluasi program pendidikan dan pelatihan dengan penerapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).
- b. Hasil penelitian ini dapat ditujukan sebagai bahan rujukan penerapan kegiatan evaluasi dalam bentuk peningkatan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan non formal di Indonesia, dimana fungsi pendidikan non formal adalah sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.

2. Manfaat filosofis

- a. Hasil penelitian ini dapat mendiskripsikan masalah secara sistematis serta melakukan pencarian makna dibalik data yang diteliti sehingga terjadinya konstruksi teori.

3. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan gambaran berdasarkan evaluasi *Context, Input, Process, Product* serta rekomendasi tepat guna bagi penyelenggara, pengambil keputusan dan pemangku kebijakan pada pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi okupasi tenaga penjual di pendidikan non formmal.
- b. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan dari kegiatan evaluasi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program pendidikan dan pelatihan okupasi tenaga penjual dan sejalan dengan tindakan pengawasan serta penjaminan mutu pendidikan.
- c. Dapat menghindari inefisiensi dana APBN Republik Indonesia serta sumberdaya untuk implementasi pendidikan dan pelatihan tepat guna.

E. State Of The Art

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka letak kebaruan (*State of Art*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat celah untuk dilakukan penelitian secara spesifik terkait evaluasi implementasi pendidikan dan pelatihan pada pengembangan kompetensi khususnya okupasi jabatan tenaga penjual dengan menggunakan terapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia kebijakan PEN “Kartu Prakerja”.
2. Dalam penelitian sebelumnya, evaluasi implementasi pengembangan kompetensi pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia yang telah dilakukan pada pelaksanaan dua tahun berjalan oleh The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan Rumah Presisi Indonesia ditahun 2022, menyatakan bahwa secara ilmiah program semi bantuan sosial melalui kebijakan PEN, “Kartu Prakerja” adalah dengan dampak positif atas eskalasi kompetensi, produktivitas, tenaga kerjaan, dan kegiatan wirausaha, dan peningkatan pendapatan para penerimanya, namun penelitian ini tidak mengambil koresponden peserta dan alumni okupasi tenaga penjual secara khusus, koresponden peserta dan alumni yang diambil secara umum berasal dari KBJI : (1) tenaga profesional, (2) teknisi dan asisten profesional, (3) tenaga tata usaha, (4) tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan, (5) pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan, (6) pekerja pengolahan dan kerajinan, (7) operator dan perakitan mesin, (8) pekerja kasar.
3. Pada penelitian CSIS Commentaries DMRU-042-ID tahun 2020, bertajuk “Program Kartu Prakerja: Tantangan Implementasi di Masa Pandemi COVID-19 dan Sesudahnya”, menganalisa lanskap pelatihan keterampilan di Indonesia serta perbandingan belajar dari program “*SkillsFuture*” di Singapura, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan penelitian evaluatif sistematis tetapi menggunakan pendekatan kualitatif komperatif dengan membandingkan persepsi dan pengalaman antara dua negara.

Setelah melakukan peninjauan ulang terhadap penelitian terdahulu maka disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai kekhususan pembahasan materi yang berbeda dengan penelitian lain, yakni secara mendalam mengkaji evaluasi implementasi pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi khususnya okupasi tenaga penjual pada program semi bantuan pemerintah Republik Indonesia dengan menggunakan terapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

